

Pariwisata Tak Terkena Efisiensi

SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyebutkan adanya efisiensi anggaran berkaitan dengan berbagai program prioritas. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah memerintahkan efisiensi anggaran sebagai upaya agar pengguna anggaran bisa lebih baik dan fokus dalam menjaga kebutuhan masyarakat.

Dia menerangkan, maka dari itu mengapa penting sebuah sistem dari pemerintah untuk melakukan skala prioritas terlebih dahulu. "Agar sumber daya yang kita miliki terbatas itu bisa digunakan secara optimal," ujar Akmal Malik.

Sehingga dalam penerapannya sebenarnya tidak asal-asalan efisiensi anggaran saja. Salah satu contoh yakni di dalam dunia pariwisata, tidak perlu untuk dilakukan efisiensi. "Karena menurut saya pariwisata kita ini bisa menghasilkan devisa dan memberikan dampak (ekonomi) bagi masyarakat," ucapnya.

Jadi ungkapnya, dalam menilai efisiensi ini jangan terlalu kaku, sebab dengan sumberdaya yang ada serta bisa dikelola dengan baik sebenarnya mampu memberikan *multiplier* efek kepada masyarakat. "Efisiensi ini dilakukan apabila tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi ketika suatu program itu bisa memberi manfaat bagi masyarakat itu merupakan tugas pemerintah," katanya.

Tentunya dalam hal ini Akmal mengingatkan sebagai pemerintahan harus bisa memberikan alternatif. "Di sinilah pentingnya pemerintah dan negara untuk hadir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Akmal Malik menegaskan, dirinya mendukung program efisiensi yang dicetuskan oleh Presiden RI. "Tetapi harus dengan skala prioritas yang jelas," sebutnya. Lebih lanjut, Akmal Malik menanggapi adanya efisiensi ini memberikan dampak kepada tenaga non ASN, salah satunya di Kabupaten Berau yang kini ketersediaan tenaga kesehatan berkurang.

Dia menerangkan, untuk hal tersebut akan segera dilakukan komunikasi kepada berbagai pihak terkait. "Karena berdasarkan arahan Presiden RI, efisiensi tidak boleh mengganggu pelayanan dasar," terangnya.

Selain itu, efisiensi yang dimaksud tidak boleh mereduksi hak-hak masyarakat dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. "Jadi kita harus duduk bersama menterjemahkan efisiensi ini secara jelas, sebab efisiensi

yang dimaksud merupakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan itu yang perlu diperbaiki," pungkask Akmal Malik. (su/sh/ts)

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Pariwisata Tak Terkena Efisiensi, 18/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

